

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### Determinant of Local Government Financial Statements Quality

Indah Shofiyah<sup>1</sup> Azmi Rizalullah<sup>2</sup> Dewi Amalia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

Received 11 May 2023

Revised 22 June 2023

Publish 26 June 2023

#### Keywords:

Fixed asset administration, Internal control system, Quality of local government financial reports, Information technology utilization.

Corresponding Author:  
dewi.amalia@act.uad.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.2004>

#### ABSTRACT

*The quality of local government financial reports is a normative measure that needs to be realized in accounting information. Normative measures of the quality of local government financial reports are relevant, reliable, comparable, and understandable. Thus, this study investigates the factors that affect the quality of financial statements. This study uses quantitative methods with survey techniques. Respondents in this study were employees involved in the accounting department at the Majalengka Regency Regional Apparatus Organization (OPD). This study involved 80 respondents. The results showed that the administration of fixed assets, internal control systems, and the utilization of information technology had a positive effect on the quality of local government financial reports in the Majalengka Regency. The results of this study indicate that the government has made efforts to improve the quality of financial reports according to normative measures of accounting information.*

#### ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Ukuran normatif kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan demikian, penelitian ini menginvestigasi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survey. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat pada bagian akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka. Penelitian ini melibatkan 80 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan menurut ukuran normatif informasi akuntansi.

#### 1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan salah satu tolak ukur menilai kinerja pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Mahmudi (2019) menyebut bahwa LKPD sebagai wujud dari akuntabilitas publik bidang keuangan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam LKPD harus memiliki karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dipahami. Banyak faktor yang berpengaruh pada kualitas LKPD, di antaranya adalah penatausahaan aset tetap (Arifuddin *et al.*, 2019; Widiati *et al.*, 2021), sistem pengendalian intern (Trisnani *et al.*, 2017; Kewo & Afiah, 2017), dan pemanfaatan teknologi informasi (Mene, *et al.*, 2018; Puspita dan Amalia, 2014; Fazlurahman *et al.*, 2021; Rohma, 2023). Salah satu akun yang disajikan dalam LKPD adalah aset tetap. Akun yang memiliki nilai tinggi dalam LKPD adalah Barang Milik Daerah (BMD). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyebutkan BMD adalah ba-

rang yang diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah. Oleh karena itu, aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah harus dikelola sebaik-baiknya dalam pengelolaan BMD.

Widiati *et al.* (2021) membuktikan bahwa pentausahaan aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menambahkan faktor lain sebagai variabel independen yaitu sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan dan tindakan terstruktur yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memberikan kepastian dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2019). Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan yang menggambarkan kualitas laporan keuangan (Rumiyati dkk., 2018). Trisnani *et al.* (2017) dan Kewo & Afiah (2017) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan komponen yang harus ada di setiap bagian seperti pada sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan atas dasar asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Penggunaan teknologi informasi akan memberikan kecepatan dan keakuratan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, termasuk dalam penyajian dan pelaporan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan memberikan dampak yang semakin baik pada penyajian laporan keuangan khususnya pada sisi waktu penyusunan dan keakuratan informasi. Penelitian sebelumnya oleh Puspita dan Amalia (2014) dan Fazlurahman *et al.* (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Objek penelitian ini adalah Kabupaten Majalengka karena Pemerintah Kabupaten Majalengka dinilai memiliki kinerja yang bisa di bilang sangat baik. Mengutip Radar Majalengka (2021) bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapatkan opini WTP dari BPK selama 2012-2020. Pencapaian tersebut didapat ketika Pemerintah Kabupaten Majalengka sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun sebagian besar merupakan infrastruktur penunjang keperluan masyarakat dan infrastruktur untuk menarik investor juga wisatawan dari luar ataupun dalam negeri. Pembangunan tersebut bukan hanya semata-mata program pemerintah daerah saja, tetapi merupakan program pemerintah pusat dan provinsi. Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi bahwa pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda melalui faktor-faktor yang secara empiris berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Penelitian ini juga mencoba membuktikan penerapan teori *stewardship* yang merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan rakyat.

## 2. TELAAH LITERATUR

Teori *stewardship* mendefinisikan bahwa pemerintah sebagai pihak yang dipercaya (*steward*) untuk melaksanakan tindakan serta memiliki dorongan yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat sebagai *principal* daripada kepentingan individu. Teori *stewardship* merupakan teori yang muncul dari psikologi dan sosiologi organisasi sebagai sebuah pandangan baru dalam membahas pengelolaan organisasi di mana manajemen tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi melainkan lebih memprioritaskan kepentingan bersama (Pitaloka, *et al.*, 2022). Teori *stewardship* dilandasi oleh asumsi filosofis tentang sifat manusia pada hakikatnya bisa diyakini, segala Tindakan dapat dipertimbangkan, jujur, dan adil kepada pihak lain (Jefri, 2018).

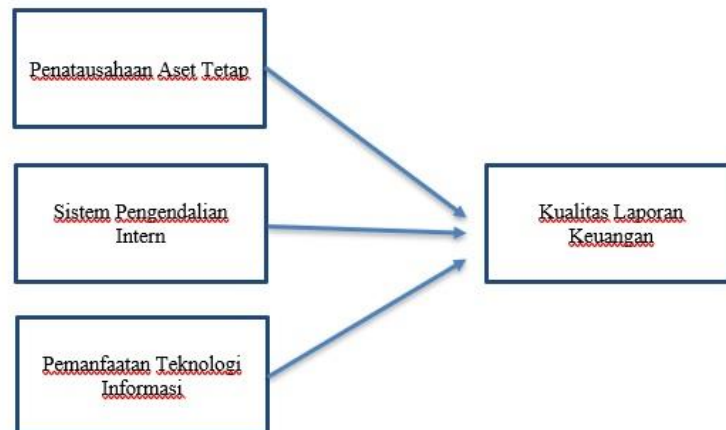
Kinerja pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan tertuang dalam laporan keuangan (Nurhayati, *et al.*, 2019; Rohma *et al.*, 2023). Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa informasi yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib memiliki karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif tersebut adalah LKPD harus bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Pertama, relevan, informasi

yang relevan yaitu memiliki manfaat, umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Kedua, andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketiga, dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Keempat, dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 definisi dari penatausahaan adalah aktivitas berupa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penatausahaan merupakan tindakan yang selalu ada pada setiap bidang pemerintahan daerah, baik itu akuntansi keuangan, akuntansi aset, bahkan administrasi. Artinya penatausahaan merupakan proses yang penting dalam berjalannya pemerintahan. Penatausahaan Barang Milik Daerah/BMD adalah tahapan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD, termasuk di dalamnya aset tetap. Penatausahaan aset tetap merupakan aktivitas pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan diartikan sebagai aktivitas mencatat aset tetap ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan kartu inventaris barang serta daftar BMD. Dalam prosesnya, pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke DBP harus sesuai dengan golongan dan kodefikasi barang. Jadi dapat diartikan juga bahwa pembukuan adalah mencatat aset daerah ke dalam DBP dan daftar BMD sesuai penggolongan dan kodefikasinya. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mendefinisikan bahwa inventarisasi adalah aktivitas mendata, mencatat dan melaporkan hasil pendataan BMD. Kata inventarisasi berasal dari kata inventaris, yaitu daftar semua barang yang dimiliki entitas. Tahapan terakhir dalam proses penatausahaan aset tetap adalah tahap pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 tahunan kepada pengguna. Kuasa pengguna dari aset tetap wajib melakukan pelaporan atas BMD yang digunakannya dalam tenggat waktu tertentu. Optimalisasi dalam penatausahaan dan pemanfaatan aset dapat meningkatkan pendapatan daerah (Prasetya, *et al.*, 2020).

Sistem pengendalian intern adalah kegiatan dan tindakan terstruktur yang dilakukan manajemen untuk memberikan kepastian dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2019). Sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik dapat memastikan bahwa organisasi telah berjalan dalam jalur yang semestinya dan pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tidak melakukan sebuah tindakan *misconduct* (COSO, 2013). Mahmudi (2019) menyatakan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian intern akan tercapai efektivitas dan efisiensi juga keandalan laporan keuangan dan keamanan aset. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. Unsur sistem pengendalian intern pemerintah: (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) aktivitas pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, serta (e) pemantauan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkungan pemerintah, ada di setiap bagian seperti sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan atas dasar asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.



**Gambar 1. Model Penelitian**

*Sumber: Data diolah, 2022*

Penatausahaan adalah suatu prosedur yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Penatausahaan aset tetap merupakan hal yang sering disorot dalam pemeriksaan. Hal itu karena aset tetap adalah salah satu akun yang selalu memiliki nilai tinggi di dalam LKPD. Pada tahun 2020 aset tetap pada Kabupaten Majalengka mendominasi komponen aset yaitu sebesar 90% dari jumlah aset keseluruhan. Pengelolaan aset juga harus memenuhi beberapa asas, di antaranya adalah asas transparansi dan asas akuntabilitas yang berarti bahwa informasi mengenai aset harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Imbiri *et al.*, 2018; Rohma, 2023). Arifuddin *et al.* (2019) dan Widiati *et al.* (2021) memberikan hasil bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian pertama yang diajukan:

H1: Penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Adanya sistem pengendalian intern membuat setiap tahapan dalam sistem akuntansi akan diawasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan bahkan kecurangan. Sistem pengendalian intern berperan dalam mendeteksi kesalahan sejak dini sehingga dapat diatasi dan diberikan rekomendasi perbaikan sesegera mungkin. Pengawasan yang efektif memastikan proses transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Lesmanawati, 2019). Hal ini dapat menghindari kemungkinan salah saji dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah salah satunya untuk mencapai keandalan laporan keuangan. Penelitian Kewo & Afiah (2017) dan Yulianto & Hariwibowo (2019) menunjukkan pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dua dalam penelitian ini adalah:

H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Penggunaan teknologi informasi akan memberikan kecepatan dan keakuratan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, termasuk dalam penyajian dan pelaporan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan memberikan dampak yang semakin baik pada penyajian laporan keuangan khususnya pada sisi waktu penyusunan dan keakuratan informasi. Penelitian sebelumnya oleh Puspita dan Amalia (2014); Yulianto dan Hariwibowo (2019); serta Fazlurahman *et al.* (2021) membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis tiga yang diajukan:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metoda *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang digunakan mencakup: responden merupakan pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka, responden bertugas pada bagian akuntansi, keuangan, atau pengelola barang milik daerah yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan staf PPK. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari tanggapan responden atas pernyataan yang diajukan peneliti dalam kuesioner.

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran kualitas laporan keuangan tersebut adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan 5 skala Likert. Semakin besar nilai pengukuran menunjukkan semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen. Pertama, penatausahaan aset tetap, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan adalah serangkaian aktivitas dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (*Permendagri No 19, 2016*). Indikator penilaian penatausahaan aset tetap meliputi pelaksanaan pembukuan, pelaksanaan inventarisasi, dan pelaksanaan pelaporan yang diukur menggunakan 5 skala Likert. Kedua, sistem pengendalian intern, sistem pengendalian intern merupakan proses yang terintegrasi dalam rangka mengawal kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan keyakinan akan efektivitas dan efisiensi dalam hal keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset (Mahmudi, 2019). Indikator penilaian SPI meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta pemantauan yang diukur menggunakan 5 skala Likert. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi, peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah, serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pengukuran variabel ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi dan perangkat lunak yang mendukung penyajian dan pelaporan keuangan yang dinilai dengan 5 skala Likert.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Instrumen valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan korelasi product moment dari Pearson. Suatu item pernyataan akan dikatakan valid apabila memiliki  $r$  hitung yang lebih besar dari  $r$  tabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47). Uji reliabilitas ini menggunakan teknik Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel ketika nilai Cronbach alpha ( $\alpha$ )  $\geq 0,6$ . Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang diawali dengan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Selengkapnya dibahas sebagai berikut.

Uji asumsi klasik mencakup beberapa pengujian. Pertama, uji normalitas, bertujuan untuk menguji model regresi, nilai variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011: 160). Pengujian dilakukan menggunakan metoda Kolmogorov-Smirnov terhadap model regresi. Kedua, uji multikolinieritas, merupakan suatu keadaan tidak terdapat atau terjadi korelasi linier di antara dua atau lebih variabel independen. Menurut Ghozali (2011: 106), untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi linear berganda yang diajukan, dapat dilihat pada nilai *variance inflation factor* (VIF). Tidak terdapat korelasi antar variabel independen jika nilai VIF  $> 10$  dan *tolerance*  $< 0,1$ . Ketiga, uji heteroskedastisitas, untuk melihat variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Metoda yang digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik scatterplots. Ketika penyebaran titik tidak beraturan atau menyebar di atas dan di bawah titik 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$  saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan pada model (Ghozali, 2011: 97). Kedua, uji simultan, menunjukkan semua variabel bebas dalam model berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Jika *p value* < ( $\alpha$ ) = 0,05, maka minimal terdapat satu variabel bebas yang secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya. Ketiga, pengujian parsial, bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika nilai signifikansi yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan nilai lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ .

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Responden pada penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubag keuangan), pengurus barang dan fungsional pada setiap OPD. Kuesioner yang disebar sebanyak 80 kuesioner dengan tingkat pengembalian sebesar 91,25%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 71 kuesioner karena terdapat 2 kuesioner tidak mendapat tanggapan secara lengkap. Secara lebih detail, rincian penyebaran kuisisioner pada penelitian ini disajikan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner**

Variabel	Jumlah Item
Jumlah Kuesioner yang disebar	80
Kuesioner yang kembali	73
Kuesioner yang tidak lengkap	2
Kuesioner yang dapat diolah	71
Tingkat pengembalian kuesioner (84/91 x 100%)	91,25%

Sumber: Data diolah, 2022

Selanjutnya dilakukan uji kualitas data terhadap tanggapan 71 responden, meliputi uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel (*df* = 69;  $\alpha$  = 5%) sama dengan 0,2335. Hasil dari uji validitas untuk seluruh item pernyataan variabel penatausahaan aset tetap, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan adalah valid karena seluruh pertanyaan memiliki nilai *r* hitung yang lebih besar dari nilai *r* tabel. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban yang didapatkan dari responden dengan kriteria uji nilai cronbach alpha ( $\alpha$ )  $\geq$  0,6 (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas penelitian ini disajikan pada tabel 2 menunjukkan seluruh cronbach alpha ( $\alpha$ ) sudah melebihi 0,6.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha ( $\alpha$ )	Keterangan
Penatausahaan Aset Tetap	10	0,781	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	14	0,776	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	6	0,779	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah	10	0,732	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

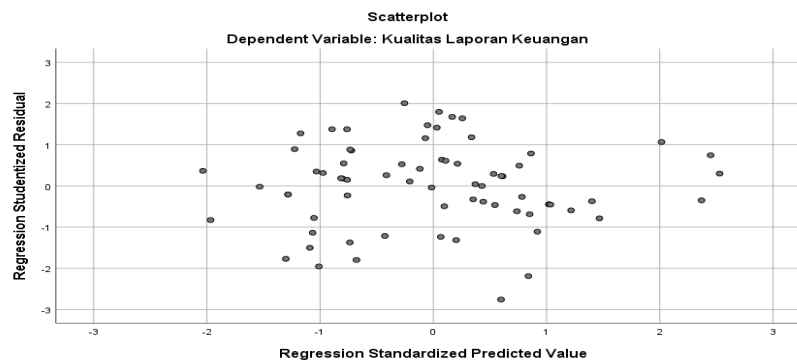
Sebelum pengujian hipotesis perlu dilakukan pengujian Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model penelitian ini mampu memprediksi nilai observasinya. Hasil Hasil uji normalitas pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal. Berdasar grafik *scatterplots* yang tertera pada Gambar 2 diketahui bahwa titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah nilai 0 sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual tidak sama untuk setiap pengamatan pada model regresi penelitian ini, dengan demikian tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasar Tabel 4 diketahui hasil uji multikolinieritas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian,

data penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<i>Cronbach Alpha (a)</i>	<b>Keterangan</b>
0,200	0,05	Normal

Sumber: Data diolah, 2022



**Gambar 2 Hasil Uji Heterskedastisitas - Scatterplots**

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>Variabel</b>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	<b>Keterangan</b>
Penatausahaan Aset Tetap	0,895	1,117	Tidak terdapat multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern	0,866	1,155	Tidak terdapat multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,961	1,041	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Item	$\beta$	<i>p value</i>		Keterangan
		<i>2 tailed</i>	<i>1 tailed</i>	
Konstanta	5,878			
Penatausahaan Aset Tetap	0,391	0,001	0,0005	H1 didukung
Sistem Pengendalian Intern	0,160	0,043	0,0215	H2 didukung
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,344	0,005	0,0025	H3 didukung

Sumber: Data diolah, 2022

**Tabel 6. Hasil Uji F**

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std error of Estimate</i>	F	Sig
1	0,601	0,362	0,333	2,734	12,657	0,000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasar hasil pengujian diketahui bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,333. Artinya bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 33,3% dan sedangkan sebesar 66,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar penelitian ini. Nilai signifikansi F sebesar 0,000 menunjukkan minimal terdapat satu variabel independen meliputi penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi yang secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasar hasil pengujian yang tertera dalam Tabel 5 diperoleh persamaan regresi berikut:  $Y = 5,878 + 0,391.X_1 + 0,160.X_2 + 0,344.X_3 + \epsilon$ . Persamaan regresi tersebut menyatakan bahwa variabel penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi 0,0005 sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini didukung karena nilai sig-

nifikansi lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi variabel penatausahaan aset tetap bernilai 0,391 yang menunjukkan setiap kenaikan 1% penatausahaan aset tetap, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,391%. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka.

Hasil pengujian terhadap variabel sistem pengendalian intern menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,0215 < 0,05$ . Oleh karena itu, hipotesis dua dalam penelitian ini dapat didukung berarti sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern bernilai 0,160 yang menunjukkan setiap kenaikan 1% sistem pengendalian intern, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,160%. Variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai p value sebesar  $0,0025 < 0,05$  sehingga hipotesis tiga dalam penelitian ini dapat didukung. Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi bernilai 0,344 yang menunjukkan setiap kenaikan 1% pemanfaatan teknologi informasi, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,344%. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka.

Pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa mendukung hipotesis pertama, dua, dan tiga. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris variabel penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka. Semakin baik penatausahaan aset tetap yang meliputi pelaksanaan pembukuan, pelaksanaan inventarisasi, dan pelaksanaan pelaporan, maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifuddin *et al.* (2019) dan Widiati *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa semakin baik penatausahaan aset tetap maka akan memberikan pengaruh yang baik pula pada kualitas laporan keuangan.

Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka. Artinya, Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat memberikan keyakinan akan efektivitas dan efisiensi dalam hal keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset yang dikelola. Semakin optimal pelaksanaan sistem pengendalian intern, maka akan semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kewo dan Afiah (2017); Trisnani *et al.* (2017); serta Yulianto dan Hariwibowo (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga mendukung hipotesis tiga yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka. Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat secara optimal melaksanakan kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Subrata *et al.* (2018) dan Fazlurahman *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa teknologi informasi akan memberikan kecepatan dan keakuratan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, termasuk ketepatan waktu dalam proses akuntansi hingga penyajian laporan keuangan. Puspita dan Amalia (2014) juga menunjukkan hasil bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Majalengka. Hasil ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap secara statistik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda yang mendukung argumen Arifuddin *et al.* (2019) dan Widiati *et al.* (2021). Hasil penelitian ini juga menunjukkan sistem pengendalian intern secara statistik memengaruhi kualitas laporan keuangan pemda mendukung argumen Kewo dan Afiah (2017) serta Trisnani *et al.* (2017) yaitu pengawasan intern yang tinggi menentukan besarnya tekanan kepada pihak manajemen dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini



juga menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan mendukung argumen Puspita dan Amalia (2014) dan Fazlurahman *et al.* (2021) bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas, terutama dalam hal ketepatan waktu dan keakuratan informasi yang disajikan.

Meskipun demikian penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak menggunakan pernyataan pembalik dalam kuesioner. Dengan demikian, saran untuk penelitian yang akan datang mencakup memperluas objek penelitian agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi, menambahkan variabel lainnya yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemda, seperti kapasitas sumber daya manusia (Subrata *et al.*, 2018; Puspita dan Amalia, 2014), dan *intern audit* (Kewo dan Afiah, 2017), menambahkan pernyataan pembalik dalam kuesioner sehingga peneliti dapat memastikan keseriusan responden dalam memberi tanggapan atas pernyataan dalam kuesioner, teknik pengumpulan data dapat diperluas dengan menggunakan wawancara agar diperoleh informasi yang lebih mendalam tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas atas laporan keuangan sesuai ukuran normatif informasi akuntansi. Dalam hal kebijakan, pemerintah dapat menetapkan regulasi dan mendorong penerapan regulasi tersebut secara jelas dan terukur sehingga pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah dapat semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, I. A., & Mansur, I. (2019). Mediation of asset optimization on the effect of asset inventory and quality of human resources in the quality of regional government financial reports in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9 (10), 200–221.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control – Integrated Framework Framework and Appendices*.
- Fazlurahman, F., Afiah, N., & Yudianto, I. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penatausahaan Aset Tetap sebagai Variabel Intervening (Studi pada BPKA Kota Bandung). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12 (2), 250–265.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harian Radar. (2021). *Majalengka Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut*. Harian Radar Majalengka, 1.
- Imbiri, J., Rofingatun, S., & J.C Pangayow, B. (2018). Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten Waropen). *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 34–62. DOI: <https://doi.org/10.52062/.v1i2.1915>
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Economics Bosowa Journal*, 4 (3): 14-28.
- Kewo, C. L., & Afiah, N. N. (2017). Does Quality of Financial Statement Affected by Internal Control System and Internal Audit? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 53(9): 1689–1699.
- Lesmanawati, D. (2019). Pengaruh Local Government Wealth, Intergovernmental Revenue, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia secara Online. *InFestasi* 15(2): 109-116.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah* (4th ed.). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Nurhayati, N., Rizani, F., & Kadir. (2019). Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. *InFestasi* 15(1): 67 – 82.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 74/PMK.07/2016 tentang *Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Pitaloka, B. D. G., Carolina, A., & Abrori, R. (2022). Peran Sistem Integritas, Sistem Pengendalian Internal, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas. *InFestasi*, 18(2): 143 – 154.
- Prasetya, A., Musyarofah, S., & Haryadi, B. (2020). Analisis Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah. *InFestasi* 16(1): 58 – 68.
- Puspita, D. H. R., & Amalia, D. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon). *Jurnal REKSA : Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit*, 3(2), 150-171.
- Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-13.
- Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(1), 62-80.
- Rumiyati, R., Zamzami, F., A, Pranesti., & Rohma, F.F. (2018). Otonomi Keuangan Universitas Negeri Dan Ranking Universitas: Studi Di Indonesia. *Jurnal Gama Societa*, 2(2), 111-120.
- Subrata, I. W., Yasa, G. W., & Astika, I. B. P. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Kualitas Laporan Barang Milik Daerah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(2), 477.
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 271-282.
- Widiati, W., Apriadi Nugraha, A., & Novianty, I. (2021). The Effect of Administration Fixed Assets on the Quality of Financial Statements at Regional Work Units in Bandung Regency. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 253-260.
- Yulianto, K. S. & Hariwibowo, I. N. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mendukung Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Wonosobo. *InFestasi* 15(2): 162 – 176.